



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**Analisis Akuntansi Opsi Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota
Padang dan Kabupaten Padang Pariaman**

Oleh :

MUHAMMAD FARHAN

2210533074

Dosen Pembimbing:

**Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA, Cert.IPSAS, CRGP, CFA, CACP,
ASEAN-CPA**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

PADANG

2026

	No. Alumni Universitas	MUHAMMAD FARHAN	No. Alumni Fakultas
	BIODATA a) Tempat/Tanggal lahir: Muara Bungo, Jambi 17 November 2004 b) Nama Orang Tua: Pathur Rahman dan Rusvita Diana c) Fakultas: Ekonomi dan Bisnis d) Jurusan: Akuntansi e) No BP: 2210533074 f) Tanggal Lulus: 3 Agustus 2026 g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,17 i) Lama Studi: 4 Tahun j) Alamat Orang Tua: RT/RW 031/009 Pasir Putih, Rimbo Tengah, Muara Bungo, Jambi.		

Analisis Akuntansi Opsen Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman

Skripsi Oleh: Muhammad Farhan

Pembimbing: Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA, Cert.IPSAS, CRGP, CFrA, CACP, ASEAN-CPA

ABSTRACT

This study aims to analyze the accounting treatment of the Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB) surcharges (opsen) implemented by the Padang City Government and Padang Pariaman Regency Government. These surcharges serve as a new source of Locally-Generated Revenue (PAD) following the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. A descriptive-comparative qualitative method was employed, utilizing primary data from interviews with three key informants and secondary data pecifically Budget Realization Reports (LRA) and Notes to the Financial Statements (CaLK). The data were analyzed based on four accounting pillars (recognition, measurement, presentation, and summarization) as outlined in Government Accounting Standards (PSAP) 02, 12, and 18. The results indicate that while both regions comply with PSAP 02, they do not yet fully comply with PSAP 12 and PSAP 18. Padang City's Operational Report (LO) is identical to its Budget Realization Report (LRA) due to a real-time cash receipt mechanism, whereas Padang Pariaman Regency exhibits a similar yet contradictory situation caused by a one-day lag (T+1) in cash receipts. Furthermore, neither region recognizes the surcharges on its Balance Sheet, a result of limited access to data that is entirely controlled by the Provincial Regional Revenue Agency (Bapenda).

Keywords: Tax Surcharges, Government Accounting, PSAP, Locally-Generated Revenue

**Analisis Akuntansi Opsen Pajak PKB dan BBNKB pada Pemerintah Kota
Padang dan Kabupaten Padang Pariaman**

Oleh:

Muhammad Farhan

NIM 2210533074

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru diterapkan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian dilakukan dengan metoda kualitatif deskriptif-komparatif, menggunakan data primer dari wawancara dengan tiga informan kunci dan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang dianalisis berdasarkan empat pilar akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) ditinjau dari PSAP 02, PSAP 12, dan PSAP 18. Hasil penelitian menunjukkan kedua daerah telah sesuai PSAP 02, namun belum sepenuhnya sesuai PSAP 12 dan PSAP 18. Kota Padang menunjukkan Laporan Operasional (LO) yang identik dengan LRA akibat mekanisme penerimaan kas real-time, sementara Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan kondisi serupa yang kontradiktif karena terdapat jeda satu hari (H+1) dalam penerimaan kas. Kedua daerah juga tidak mengakui piutang opsen dalam Neraca akibat keterbatasan akses data yang sepenuhnya dikuasai Bapenda Provinsi.

Kata Kunci: Opsen Pajak, Akuntansi Pemerintahan, PSAP, Pendapatan Asli Daerah